

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun yang bersejarah bagi dunia, karena pada tahun ini muncul virus varian baru yang dikenal dengan istilah virus Corona atau Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *SARS-CoV-2*. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Kemudian, virus ini mulai menyebar keseluruh dunia pada awal tahun 2020 salah satunya Indonesia.



Indonesia sendiri sudah memberlakukan berbagai kebijakan seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan di beberapa kota besar dengan kasus tertinggi.<sup>1</sup> Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia justru tidak menerapkan *Lockdown* karena menurut pemerintah hal itu hanya akan mematikan perekonomian masyarakat. PSBB diberlakukan pemerintah untuk menekan angka Covid-19, sehingga diharapkan dapat mengurangi kasus Covid-19. Pembatasan yang dimaksud ialah pembatasan dalam kegiatan keagamaan, menutup sekolah dan tempat kerja, pembatasan di fasilitas umum seperti tempat hiburan/ tempat wisata, serta pembatasan moda transportasi.

Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan segala sendi kehidupan dunia dilakukan dengan batasan-batasan tertentu, agar tidak membahayakan orang

---

<sup>1</sup> PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 diakses pada <https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-eMXT> diakses pada tanggal 30 Januari 2021.

lain dan tidak semakin memperburuk keadaan. Di beberapa negara di belahan dunia sendiri berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, diantaranya seperti melakukan *Lockdown*. *Lockdown* diartikan sebagai penutupan akses pada suatu area atau wilayah, penutupan akses baik itu akses masuk ataupun akses keluar. Dengan kebijakan ini mengakibatkan masyarakat di suatu negara hanya dapat beraktifitas di dalam rumah, dan segala bentuk usaha baik itu tempat makan, tempat hiburan harus dipaksa tutup, yang diperbolehkan tetap buka adalah minimarket atau supermarket.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sendiri sampai saat ini pun masih belum menunjukkan kurva melandai, melainkan masih terdapat penambahan kasus Covid-19 setiap harinya.<sup>2</sup> Dan kasus ini nampaknya akan terus bertambah dari hari ke hari.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat yang kasus Covid-19-nya cukup tinggi dengan kasus positif sebanyak 29 kasus.<sup>3</sup> Kasus Covid-19 mulai teridentifikasi karena ditemukan 7 orang warga kabupaten Dharmasraya yang positif Covid-19, 7 orang ini diperkirakan terpapar virus Covid-19 setelah mengikuti Ijtima Ulama di Gowa, Sulawesi Selatan. Jumlah 7 orang tersebut berasal dari beberapa kecamatan yang mana masing-masing berasal dari 3 orang asal Koto Baru, 2

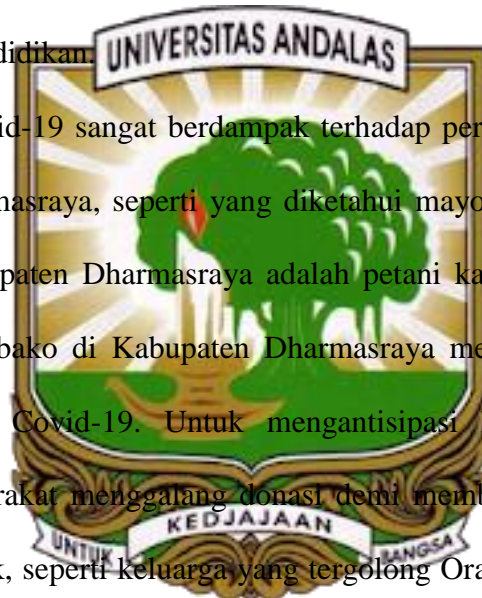


---

<sup>2</sup>Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tercatat ada penambahan sebanyak 14.518 kasus positif. Sehingga secara akumulatif ada 1.066.313 kasus Covid-19 di Indonesia hingga saat ini. Jumlah penambahan kasus didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 70.026 spesimen dalam 24 jam terakhir. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/30/17161681/sebaran-14518-kasus-baru-covid-19-di-indonesia-jawa-barat-tertinggi> diakses pada tanggal 30 Januari 2021.

<sup>3</sup>Republika.Com. (2020) Bertambah 18, Kematian Covid-19 di Sumbar Tembus 1.280 orang. <https://www.republika.co.id/berita/qw2o5p349/bertambah-18-kematian-covid19-di-sumbar-tembus-1280-orang> diakses pada tanggal 07 Oktober 2021.

Orang asal Alahan Nan Tigo, dan 2 orang lagi berasal dari Pulau Punjung. Bermula dari 7 orang inilah kasus Covid-19 mulai menjalar ke berbagai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, pada September 2020 kembali ada peningkatan kasus Covid-19 10 orang tenaga pendidik yang diketahui dari hasil tes swab massal yang tergolong orang tanpa gejala (OTG). Selain itu juga tercatat 7 orang tenaga medis Puskesmas Padang Laweh yang terpapar virus Covid-19.<sup>4</sup> Dengan penambahan kasus Covid-19 setiap harinya tentu sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat, diantaranya dalam hal ekonomi dan pendidikan.



Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Dharmasraya, seperti yang diketahui mayoritas mata pencaharian masyarakat Kabupaten Dharmasraya adalah petani karet dan sawit. Adapun harga untuk sembako di Kabupaten Dharmasraya melambung cukup tinggi karena pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi hal tersebut beberapa kelompok masyarakat menggalang donasi demi membantu masyarakat yang sangat berdampak, seperti keluarga yang tergolong Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Keluarga Kurang Mampu. Kabupaten Dharmasraya sendiri terdiri dari 11 kecamatan dan semua

---

<sup>4</sup>Tes untuk mendeteksi infeksi virus corona penyebab Covid-19 menggunakan metode PCR (Polymerase Chain Reaction), atau biasa disebut dengan tes swab. Pemeriksaan swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Sampel lendir yang diambil dengan metode swab nantinya akan diperiksa menggunakan metode PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Hasil akhir dari pemeriksaan ini, nantinya akan benar-benar memperlihatkan apabila ada virus *SARS-COV2* (penyebab Covid-19) di tubuh seseorang. Dilansir dari <https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-pcr-rapid-test-antigen-dan-rapid-test-antibodi-dalam-pemeriksaan-covid-19> diakses pada tanggal 30 Januari 2021.

kecamatan tersebut terdapat kasus Covid-19 nya. Berikut tabel tentang kasus Covid-19 di setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 1.1 Kasus Covid-19 Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya hingga 31 Desember 2020**

No	Nama Kecamatan	Konfirmasi Positif Covid-19					JML
		Rawat	Sembuh	Isolasi Mandiri	Karantina	Meninggal	
1.	Pulau Punjung	1	177	4	0	3	185
2.	IX Koto	0	8	0	0	0	8
3.	Sitiung	0	69	5	0	1	75
4.	Koto Baru	0	38	3	0	1	42
5.	Koto Besar	2	17	2	0	1	22
6.	Sungai Rumbai	0	35	2	0	0	37
7.	Asam Jujuhan	0	0	0	0	0	10
8.	Padang Laweh	0	21	0	0	0	21
9.	Timpeh	0	5	0	0	0	5
10.	Tiumang	0	5	0	0	0	5
11.	Koto Salak	0	12	4	0	0	16
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>394</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>

Sumber: Data Covid-19 hingga 31 Des Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Pandemi Covid-19 selain berdampak pada perekonomian juga sangat berdampak terhadap bidang pendidikan. Proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara langsung di sekolah, terpaksa dialihkan kepada proses belajar secara mandiri di rumah masing-masing siswa. Kemudian pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan surat edaran untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar tingkat SMP dan SD dilakukan secara daring atau sekolah mandiri (*Online*), hal tersebut sebagai antisipasi agar penyebaran Covid-19 tidak terus bertambah, dan demi keselamatan bersama. Setidaknya terdapat 3 potensi yang dirasakan pada sektor pendidikan pada masa pandemi diantaranya: *Pertama* putus sekolah, karena pada masa

pandemi banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, sehingga anak rentan untuk berhenti bersekolah karena kekurangan dana. *Kedua* penurunan capaian belajar, penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar anak. *Ketiga* kekerasan pada anak dan risiko *eksternal*, ketika PJJ diterapkan maka aktivitas anak lebih banyak dihabiskan di rumah, hal ini ditakutkan sang anak akan mengalami kekerasan di rumah, selain itu risiko *eksternal* seperti peningkatan pernikahan dini, eksploitasi anak, dan kehamilan dikalangan remaja.<sup>5</sup>

Proses belajar secara daring atau *online* diterapkan pada tahun ajaran 2019/2020. Pada tahun ajaran baru 2020/2021, PEMKAB Dharmasraya memutuskan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran secara tatap muka. Akan tetapi ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran, adapun syarat-syaratnya seperti kesepakatan wali murid, semua guru wajib tes Swab, dan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan protokol keamanan serta kesehatan.<sup>6</sup> Syarat untuk menyelenggarakan pembelajaran tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Bupati Dharmasraya No: 425/ 1/ 829/ DISDIK- 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada masa transisi di masa pandemi Covid-19.



<sup>5</sup>Kemendikbud.go.id. (2021). 3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik yang Harus Diwaspadai. <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/> diakses pada tanggal 23 November 2021.

<sup>6</sup> Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memutuskan untuk menyelenggarakan kembali sekolah tatap muka per 1 September 2020. Keputusan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Bupati Dharmasraya No: 425/ 1/ 829/ DISDIK- 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada masa transisi di masa pandemi Covid-19. Adapun tentang penyelenggaraan sekolah tatap muka ini diperbolehkan bagi sekolah yang telah memenuhi syarat kesiapan untuk pelaksanaan pembelajaran pada masa transisi. Bagi sekolah yang telah memenuhi persyaratan dapat memulai tanggal 1 September dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diakses pada <https://langgam.id/mulai-1-september-dharmasraya-kembali-adakan-sekolah-tatap-muka/> tanggal 23 Februari 2021.

Dalam tahapan kebijakan publik terdapat evaluasi yang mana tahapan evaluasi ini mencakup aspek implementasi. Implementasi kebijakan publik sendiri adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Pada kenyataannya, implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks dan seringkali secara politis bertanggung jawab atas intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan secara luas dianggap sebagai alat administratif di mana aktor, organisasi, proses, teknologi, dan sumber daya diorganisasikan bersama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir. Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana berbagai elemen tersebut bekerja secara harmonis. Hal ini ditandai dengan interaksi antar aktor, kemampuan pelaksana di lapangan, strategi memberikan informasi atau sosialisasi, dan kemampuan organisasi.

Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan bahkan

---

<sup>7</sup> Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hlm 139-140.

pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (1981:32), dengan tegas pernah mengatakan bahwa “*the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jackets unless they are implemented*” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).<sup>8</sup> Sehingga dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, sebab melalui prosedur inilah proses kebijakan secara keseluruhan dapat diidentifikasi keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Dan dampak kebijakan publik juga termaksud ke dalam tahapan implementasi ini, karena dampak kebijakan merupakan hasil yang diperoleh dari dikeluarkannya sebuah kebijakan publik, apakah memberikan hasil yang positif atau justru memberikan hasil yang negatif.

Implementasi kebijakan publik, juga memiliki beberapa model yang dapat digunakan untuk menentukan masalah atau tujuan dari sebuah kebijakan. Setiap jenis kebijakan memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Ada kebijakan yang lebih tepat menggunakan model implementasi *top-down*, ada yang lebih tepat dengan model implementasi *bottom-up*, bahkan ada juga yang lebih tepat dengan menggabungkan atau memadukan kedua model yaitu bersifat *top-downer* dan *bottom upper*. Selain itu terdapat

---

<sup>8</sup> Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm 126

kebijakan dengan mekanisme pasar yang lebih efektif dan ada juga mekanisme paksa yang tepat dan efektif

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai analisis dampak kebijakan pemerintah tentu sudah banyak dilakukan oleh beberapa pihak, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fatkhur Rohman Albanjari, dkk (2021) dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi *Coronavirus Disease-19*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan variabel *Financing Deposit Ratio (FDR)*, *Non-Performing Financing (NPF)* pada masa pandemi COVID-19. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan yang dikeluarkan pada saat penerapan PSBB hingga *New Normal* mempengaruhi kesehatan keuangan. Hal ini menunjukkan *financing deposit ratio* pada bank umum syariah pada kuartal 1 dan kuartal 2 mengalami kenaikan rata-rata. Sedangkan pada kuartal 3 sudah mengalami penurunan mendekati 75% sehingga bisa diartikan kesehatan keuangan lebih stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performing financing* pada bank umum syariah cenderung lebih stabil, sehingga bisa dikatakan bahwa Bank Umum Syariah pada era pandemic COVID-19 cenderung sehat.

Sedangkan penelitian lainnya yang membahas mengenai analisis dampak kebijakan pemerintah adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhajir & Muhammad Nasir (2017) dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Pada Transportasi Publik Trans Koetaradja Terhadap Labi-Labi (Studi Kasus: Terminal Keudah-Darussalam). Metode yang digunakan dalam



penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan hasil Penelitian menunjukkan bahwa hadirnya transportasi Trans Koetaradja berpengaruh negatif bagi supir transportasi Labi-Labi serta mempengaruhi pendapatan, dan biaya operasional supir transportasi labi-labi yang ada di Kota Banda Aceh, kebanyakan dari responden menunjukkan bahwa mereka harus mencari pekerjaan sampingan untuk mendapat pendapatan tambahan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan riset terdahulu tersebut, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian lebih memfokuskan pembahasan terkait analisis dampak kebijakan pemerintah kabupaten terhadap pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan pada masa pandemi (Covid-19). Sehingga berangkat dari riset terdahulu tersebut penulis ingin mengetahui lebih dalam dan lebih lanjut mengenai dampak kebijakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada pendidikan dasar (SD, SMP) pada masa pandemi Covid-19. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat menjelaskan dan menganalisis dampak kebijakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di masa pandemi Covid-19.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten dengan kasus Covid-19 yang terbilang cukup tinggi, sempat menjadi kawasan zona merah yang rentan akan penularan Covid-19, hal tersebut memaksa Kabupaten Dharmasraya untuk mengeluarkan kebijakan agar kegiatan belajar dilakukan dari rumah, kebijakan tersebut berlaku bagi TK/PAUD, SD, SMP sederajat,

sedangkan untuk tingkat SMA/ Sederajat proses belajar mengajar dikembalikan kebijakannya kepada provinsi. Proses belajar mengajar mulai berlangsung dengan masa percobaan selama 14 hari terhitung pada tanggal 2 April 2020, namun kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 19 April 2020, kegiatan belajar dari rumah ini bertujuan sebagai antisipasi penularan Covid-19. Kegiatan belajar dari rumah ini sesuai dengan Surat Instruksi Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan Nomor 425/1/519/Disdik-2020 Tentang Kebijakan Pembelajaran Di Rumah Dalam Rangka Penanganan Tindakan *Preventif* Dampak *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).<sup>9</sup>

Walaupun proses pembelajaran dilakukan secara mandiri kegiatan belajar harus tetap dapat berjalan sebagaimana yang semestinya, sesuai dengan informasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI diantaranya membatalkan Ujian Nasional (UN), teknis pelaksanaan ujian sekolah, penentuan kelulusan siswa dan kenaikan sekolah, dan penggunaan



<sup>9</sup>Dalam surat instruksi tersebut terdapat 9 poin. Poin pertama memindahkan proses belajar mengajar di rumah masing-masing, terhitung Jum'at (20/3) hingga 2 April 2020. Poin kedua, selama proses belajar di rumah, tenaga pendidik memberikan tugas kepada peserta didik sesuai dengan program pembelajaran yang telah direncanakan. Ketiga, selama kegiatan belajar di rumah siswa dilarang melakukan aktivitas lainnya di luar rumah atau mengunjungi fasilitas umum atau tempat keramaian lainnya. Keempat selama siswa belajar di rumah, bagi yang memungkinkan pihak sekolah dan siswa dapat menggunakan media belajar daring seperti ruang guru, ruang belajar *TV Education*, *Whatsapp Grup* atau sejenisnya. Kelima menunda segala bentuk kegiatan lomba Festival dan atau kegiatan lainnya yang telah diagendakan dari seluruh tingkatan. Keenam, kepada seluruh orang tua siswa dan segenap masyarakat untuk turut serta memantau sekaligus memberikan pengawasan terhadap seluruh siswa selama kegiatan belajar di rumah. Ketujuh, satuan polisi pamong praja, Kabupaten Dharmasraya diminta melakukan pengawasan serta penindakan terhadap siswa yang beraktifitas di luar rumah tanpa pendampingan orang tua secara langsung. Kedelapan pihak sekolah agar melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh bangunan dan fasilitas sekolah serta memberikan laporan kepada pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Dan terakhir, untuk SMA, SMK, SLB Negeri dan swasta agar menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Diakses di <https://www.topsatu.com/antisipasi-korona-ini-instruksi-bupati-dharmasraya/23> Februari 2021.

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk keperluan penanggulangan Covid-19.

Pandemi Covid-19 ini tentu berpengaruh besar terhadap pendidikan, sebab setiap siswa harus dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang terbilang baru bagi setiap siswa. Begitu juga dengan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan pada dunia pendidikan, siswa yang terbiasa belajar menerima dan menimba ilmu secara langsung, bertemu guru dan berinteraksi dengan teman-teman. Pada masa pandemi Covid-19 ini setiap siswa dituntut untuk belajar secara mandiri di rumah masing-masing dengan sistem pembelajaran yang sangat baru bagi siswa maupun bagi orang tua. Adapun dampak besar pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya sangat tidak familiar dengan sekolah di rumah, sehingga menjadi tugas tambahan bagi setiap orang tua di luar pekerjaan sehari-hari mereka. Dan untuk siswa mereka yang terbiasa belajar tatap muka, diajarkan menggunakan teknologi pembelajaran seperti *Whatsapp*, *Classroom*, *Google*, dan lainnya tapi masih banyak siswa yang belum menguasai teknologi tersebut, dan juga jaringan yang kurang memadai menjadi salah satu penghambat bagi proses belajar *Online*.



Pada tanggal 1 September 2020 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberlakukan pembelajaran tatap muka, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun kasus Covid-19 masih tinggi di Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Dharmasraya

dengan percaya diri memutuskan proses belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah, dengan memperhatikan protokol kesehatan demi keselamatan siswa dan para guru. Proses belajar mengajar ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 425/1/829/DISDIK-2020, tentang penyelenggaraan pembelajaran pada masa transisi di masa pandemi Covid-19. Sebelum pelaksanaan tatap muka, setiap guru wajib mengikuti tes swab sebagai syarat utama pemberlakuan sekolah tatap muka di Dharmasraya. Adapun yang mengikuti tes swab ini dilakukan sekitar 2.481 guru yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2020. Setelah tes swab, ditemukan 3 guru yang positif Covid-19, satu dari kec. Padang Laweh, satu dari kec. Sitiung, dan satu lagi dari kec. Sungai Rumbai. Untuk 3 guru yang dinyatakan positif Covid-19 ini masing-masing sekolahnya belum diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka, sampai 3 guru ini dinyatakan sembuh total. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan oleh 193 sekolah sudah termasuk SD dan SMP, jumlah ini sudah sekitar 50 persen sekolah yang ada di Dharmasraya. Berikut tabel SD dan SMP di Kabupaten Dharmasraya.



**Tabel 1.2**  
**DAFTAR SEKOLAH DASAR (SD)/ SEDERAJAT & SEKOLAH**  
**MENENGAH PERTAMA (SMP)/ SEDERAJAT**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

No	Kecamatan	SD/ Sederajat			SMP/ Sederajat		
		Negeri	Swasta	Jml	Negeri	Swasta	Jml
<b>Total</b>		<b>149</b>	<b>21</b>	<b>170</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>59</b>
1.	Sungai Rumbai	11	2	13	3	3	6
2.	Koto Baru	16	2	18	5	5	10
3.	Sitiung	20	3	23	3	4	7
4.	Pulau Punjung	25	5	30	8	4	12
5.	Sembilan Koto	15	0	15	3	1	4
6.	Timpeh	11	1	12	4	2	6
7.	Koto Salak	13	1	14	3	0	3
8.	Tiumang	12	1	13	1	1	2
9.	Padang Laweh	5	0	5	1	0	1
10.	Asam Jujuhan	5	4	9	1	0	1
11.	Koto Besar	16	2	18	3	4	7

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=081200&level=2> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021.

Dan pada tanggal 1 September 2020 proses belajar mengajar kembali dilakukan secara tatap muka berlaku untuk SD dan SMP, dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan serta mengatur tempat duduk siswa dengan jarak minimal 1 meter. Sekolah juga diharuskan memiliki tempat mencuci tangan, serta di setiap kelas dilengkapi dengan antiseptik, dan proses pembelajaran di sekolah dilakukan secara singkat yaitu sekitar 4 jam tanpa istirahat hal ini berpedoman kepada SKB Menteri Nomor. 01/ KB/ 2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor: HK. 03. 01/ Menkes/ 363/ 2020, Nomor: 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan penjelasan uraian pada latar belakang, kemudian peneliti

berasumsi bahwa Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 425.1/829/DISDIK-2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada masa transisi di masa pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan pendidikan di kabupaten Dharmasraya.

Asumsi ini berdasarkan data yang peneliti peroleh walaupun belajar tatap muka sudah diterapkan, walaupun orang tua memberikan izin bagi anak untuk melaksanakan belajar mengajar secara langsung di sekolah tentu juga memiliki kekhawatiran tersendiri untuk melepaskan sang anak belajar di sekolah, karena masih adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya.

Sedangkan bagi guru, proses belajar mengajar langsung dilakukan dengan sistem *shift* yang mana satu kelas dibagi 2 kelompok yaitu *shift* A dan *shift* B. Dan proses belajar mengajar dilakukan dengan dua sistem yaitu *online* dan *offline*. Jika *shift* A belajar *online* di rumah, maka *shift* B belajar secara langsung di sekolah, begitu juga sebaliknya bergantian setiap hari. Dengan pelaksanaan belajar mengajar dengan sistem *shift* dan sistem kombinasi ini tentu tanggung jawab guru lebih banyak, disamping guru harus mengajar secara langsung di sekolah juga menghandle belajar secara *online*. Hal ini tentu membuat guru menjadi kewalahan untuk melakukan proses belajar dengan kombinasi sistem ini. Dan untuk siswa belajar secara langsung yang diterapkan 4 jam tanpa istirahat, tentu akan mempengaruhi daya tangkap siswa. Selain itu siswa akan mudah bosan ketika hanya mendengarkan guru menjelaskan, tanpa adanya istirahat. Di sisi lain, siswa juga harus beradaptasi



dan kebingungan dengan sistem kombinasi satu hari belajar secara langsung di sekolah dan satu hari belajar mandiri di rumah.

Berangkat dari asumsi tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam dan lebih lanjut mengenai analisis dampak kebijakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada pendidikan dasar (SD, SMP) pada masa pandemi Covid-19. Karena kebijakan belajar secara langsung di masa pandemi, tentu mendapatkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Sehingga SE yang dikeluarkan tersebut dapat saja berdampak positif dan diterima dengan baik, namun bisa juga berdampak negatif dan ditentang banyak pihak. Berdasarkan asumsi tersebut maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana dampak Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 425.1/829/DISDIK-2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada masa transisi di masa pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di masa pandemi Covid-19?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dampak kebijakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di masa pandemi Covid-19.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan kajian dalam pengembangan ilmu politik, khususnya pada bidang analisis kebijakan publik. Dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik membahas analisis dampak dari suatu kebijakan pemerintahan.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan gambaran, dan pemahaman kepada para pembaca mengenai dampak kebijakan Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya terhadap pendidikan dasar dan menengah.

